

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan evaluasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terkait dengan ketujuh pengecualian yang ada dalam opini Wajar Dengan Pengecualian, maka diketahui bahwa pada pengecualian pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUD dan Bidang Perbendaharaan belum optimal dalam melakukan pengendalian terkait sisa-sisa kas, tidak tertib dalam menertibkan rekening-rekening di ruang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lembata yang menjadi tanggungjawabnya. Kedua, terkait pengendalian intern atas pengelolaan piutang daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lembata masih kurang optimal, sebagai akibat dari tidak taatnya aparatur yang mengelola dengan aturan perundang-undangan. Ketiga, terkait masalah penyajian investasi permanen pada PD Purin Lewo kurang optimal dalam menyajikan laporan keuangan PD yang ada di daerahnya. Keempat tentang lemahnya pengendalian rekonsiliasi data aset, pemerintah daerah Kabupaten Lembata maka akibatnya data aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2017 belum dapat diyakini kewajarannya. Kelima tentang akibat dari kebijakan akuntansi terkait pendapatan dan belanja yang belum dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten

Lembata maka sisa kas dana BOS dan aset tetap yang bersumber dari dana BOS per 31 Desember 2017 belum bisa disajikan.

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan keempat narasumber yang menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi saat menerapkan basis akrual sama dengan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi penerapan akuntansi basis akrual.
- c. Pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah menyajikan ketujuh komponen laporan keuangan namun masih perlu memperhatikan beberapa ketidaksiapaannya. Berikut kesimpulan yang diambil dari ke 4 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata secara umum sesuai dengan PSAP 02, kecuali PSAP 02 paragraf 9 yang tidak sesuai karena tidak mengidentifikasi secara jelas informasi tentang mata uang pelaporan.

2) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sudah sesuai dengan PSAP 03.

3) Neraca

Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata secara umum sesuai dengan PSAP 01, PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, Kecuali PSAP 01 paragraf 45, PSAP 01 paragraf 49, dan PSAP 01, PSAP 06 paragraf 10, PSAP 09 Paragraf 11.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata secara umum sesuai dengan PSAP 12, kecuali PSAP 12 paragraf 12 karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tidak mengidentifikasi nama mata uang pelaporan dalam laporan operasional sehingga dikatakan tidak relevan.

d. Faktor-faktor yang menghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yakni :

- 1) Jumlah SDM dari pegawai yang masih rendah sebagai akibat dari latarbelakang pendidikan yang dimiliki bukan dari akuntansi, tidak memiliki pengalaman, dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pegawai.
- 2) Aplikasi SIPKD masih berpusat di Kantor Badan Keuangan Daerah; baru beberapa kantor di sekitar yang sudah menggunakannya.
- 3) Tidak adanya tenaga IT di daerah khususnya di Kantor Badan Keuangan Daerah.

6.2. Saran

Saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Lembata perlu menyelesaikan masalah-masalah pengecualian terkait opini WDP yang diberikan oleh BPK. Dari pengecualian pertama terkait dengan sisa UUDP, maka perlu dilakukan mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), yang kemudian suat keputusan yang diterbitkan akan dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan Aset lainnya-Piutang TPTGR. Pengecualian kedua terkait dengan lemahnya pengendalian intern atas piutang daerah maka perlu ditanamkannya budaya dan prilaku dari para pengelola agar sadar akan pentingnya pengendalian. Pengecualian ketiga yakni laporan keuangan yang tidak didukung dari penyajian investasi permanen PD Purin Lewo maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lembata perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan PD yang ada di daerahnya. Pengecualian keempat yakni lemahnya pengendalian rekonsiliasi data aset tetap yang disajikan maka pemerintah daerah kabupaten Lembata perlu menyelesaikan masalah inventarisasi yang ada. Dan pengecualian kelima yakni tentang kebijakan akuntansi yang belum dimiliki maka pemerintah daerah Kabupaten Lembata perlu membuat kebijakan akuntansi terkait pendapatan dan belanja yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas.

- b. Pemerintah daerah Kabupaten Lembata harus lebih terperinci dalam menyajikan pos-pos yang ada dalam setiap laporan keuangan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 meskipun tidak ada anggaran pada periode yang bersangkutan.
- c. Pemerintah daerah Kabupaten Lembata mengusulkan untuk ditambahkan tenaga (pegawai) dengan basic ilmu akuntansi pada bidang akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.
- d. Penempatan tenaga IT pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.
- e. Memfasilitasi dan melakukan pelatihan secara *continue* dalam bidang Akuntansi guna memperlancar pelaksanaan aktivitas.
- f. Inisiatif dan motivasi sendiri dari pegawai guna meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan diskusi tim untuk menyelesaikan masalah atau berbagi informasi baru yang berguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, W. Marseto. 2017. Perbedaan Basis AkruaI Dan Basis Kas. . (<https://www.scribd.com/document/368158585/Perbedaan-Basis-AkruaI-Dan-Basis-Kas> diakses tanggal 15 April 2018).
- Artikelsiana. 2015. APBN & APBD (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Prinsip). Artikel Ekonomi. Online. (www.artikelsiana.com diakses tanggal 15 Februari 2018).
- Asfiansyah, Ahdony. 2015. *Strategi Implementasi Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota "S")*. Jurnal Neo-Bis Vol. 9 No. 1, Juni 2015. (Diakses 8 November 2017).
- Astuti, Y. Lindri. 2017. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar*. Skripsi dipublikasikan. Surakarta: Institut Agama Islam Surakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2015. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2017. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferryono, Baries dan Sutaryo. 2017. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) Journal of Accounting and Bussiness Dynamics Vol. 4 (1), 2017, pp 143-160*. Diakses tanggal 5 September 2018.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Haryanto, Agus. 2012. *Penggunaan Basis Akruwal Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Dharma Ekonomi, Diakses 8 November 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan. 2015. *Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Pusat*.
- Kristiawati, Endang. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat*. Jurnal EMBA Vo. VIII No. 3, Desember 2015, hal. 171-190. (Diakses 13 Februari 2018).
- Lamonisi, Sony. 2016. *Analisis Standar Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Kota Tamohon*. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1, Maret 2016, hal. 223 – 230.
- Langelo, Friska, dkk. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1, Maret 2015, hal. 1 – 8. (Diakses 8 November 2017).
- Mu'am, Ahmad. 2015. *Basis Akruwal dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Jurnal Lingkar Widya Swara Edisi 2 No. 1, Jan – Mar 2015 p. 38 – 46.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mulya, Budi. *Penggunaan Akuntansi Akruwal Di Negara-Negara Lain: Tren Di Negara-Negara OECD*. (Diakses 8 November 2017)
- Noname. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta: Visimedia.
- Noname. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Akruwal Pada Pemerintah Kota Pontianak*. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, Hal. 157-166. (Diakses 17 September 2018)
- Noname. 2018. *Pengertian Laporan Keuangan Daerah Menurut Para Ahli*. (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-laporan-keuangan-daerah-menurut-para-ahli/> Diakses 6 Juni 2018) .
- Novianti, Evelyn. 2016. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Skripsi

- dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma (Diakses 8 November 2017).
- Pendidikan, Eureka. 2015. *Pengertian dan Jenis-Jenis Variabel Dalam Penelitian dan Evaluasi*. (<https://www.eurekapedidikan.com/2015/09/pengertian-dan-jenis-jenis-variabel-penelitian-evaluasi.html?m=1> Diakses tanggal 5 Juni 2018).
- Rintiani, W. Nista. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. Universitas Negeri Surabaya.
- Riyani, Yani dkk. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Kota Pontianak*. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.6 No. 2 Juli 2017, Hal. 157-166 (Diakses 15 September 2018)
- Pratiwi, A. Indah, dkk. 2015. *Transisi Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. (<https://aeyogy.wordpress.com/2015/05/05/transisi-penerapan-akuntansi-pemerintah-berbasis-akrual/>Diakses tanggal 15 Februari 2018).
- Safitri, Devi. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jurnal Akuntansi Vol. 5, No. 2, April 2017 : 174-189 (Diakses 15 September 2018).
- Sitorus, Selvina, dkk. 2015. *Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA Vol. 3, No. 1, Maret 2015 (Diakses 13 Februari 2018).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wikipedia. 2006. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. (<https://id.m.wikipedia.org> diakses 15 Februari 2018).
- Yunusmoha. 2016. *Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?*. (<https://yunusmoha.wordpress.com/2016/03/18/kas-di-bendahara-pengeluaran-apa-saja-di=dalamnya/> Diakses 23 November 2018).